



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



STASIUN KIPM ACEH

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan ini untuk menyajikan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh tahun 2025 dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta berdasarkan perkembangan indikator yang ada.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Aceh di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.

Aceh Besar, 20 Januari 2025

Kepala SKIPM Aceh



Diky Agung Setiawan S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
i Daftar Isi	ii
ii Daftar Tabel.....	iii
iii Daftar Gambar.....	iv
iv Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Arah Kebijakan Isu Strategis.....	4
1.3 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi Misi	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	8
3.2 Anggaran	85
3.3 Sumber Daya Manusia.....	88
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Rekomendasi	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2025	15
Tabel 2 Rekapitulasi Sertifikasi CPIB Kapal SKIPM Aceh Tahun 2025	16
Tabel 3 Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2025	21
Tabel 4 Data Kegiatan HACCP Tahun 2025 Di HACCP Online	21
Tabel 5 Data Kegiatan Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) Tahun 2025.....	22
Tabel 6 Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2025	29
Tabel 7 Data Ekspor SKIPM Aceh Tahun 2025.....	32
Tabel 8 Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2025	33
Tabel 9 Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2025	35
Tabel 10 Target dan Realisasi Realisasi Nilai IKPA Tahun 2025	47
Tabel 11 Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2025	53
Tabel 12 Target dan Realisasi IKS 03.03 Tahun 2025	56
Tabel 13 Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2025	59
Tabel 14 Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2025	61
Tabel 15 Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2025	67
Tabel 16 Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2025	71
Tabel 17 Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2025	76
Tabel 18 Detail Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2025	80
Tabel 19 Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2025	81
Tabel 21 Data Neraca Barang Milik Negara Tahun 2025	87
Tabel 22 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	88
Tabel 23 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2025	3
Gambar 2. Sasaran Strategis Tahun 2025	7
Gambar 3. Sasaran Kinerja Tahun 2025 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2025	9
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2025.....	10
Gambar 5 <i>Capture</i> Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2025	11
Gambar 6 Rangkaian Kegiatan Sektor Produksi Primer Tahun 2025	18
Gambar 7 Sertifikat CPIB Kapal dan CPIB Benih SKIPM Aceh Tahun 2025.....	19
Gambar 8 Kegiatan Sektor Produksi Pasca Panen Tahun 2025	25
Gambar 9 Kegiatan Monitoring Penjaminan Mutu Perikanan Domestik	27
Gambar 10 Koordinasi dan Pendampingan Ekspor Tahun 2025.....	32
Gambar 11 Pelaksanaan dan Sertifikat Kegiatan Surveilans dan Witness SNI ISO/IEC 17025:2017	36
Gambar 12 Sertifikat SNI ISO/IEC 17020:2012 SKIPM Aceh.....	41
Gambar 13 Sertifikat Penghargaan Capaian IKPA Terbaik Dari KPPN Banda Aceh	46
Gambar 14 Capture Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	47
Gambar 15 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan <i>Central Government Advisory</i> Tahun 2025	48
Gambar 16 Indikator kinerja NKPA SKIPM Aceh Tahun 2025.....	52
Gambar 17 Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025.....	58
Gambar 18 Capaian Indikator Kinerja Penilaian SAKIP SKIPM Aceh Tahun 2025	62
Gambar 19 Sertifikat Pelatihan E–Milea SAKIP Tahun 2025.....	63
Gambar 20 Capture Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2025	66
Gambar 21 Tangkap Layar Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Sampai Dengan Tahun 2025.....	70
Gambar 22 Tangkap Layar Data Capaian Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM SKIPM Aceh Tahun 2025	75
Gambar 23 Jenis Layanan BPPMHKP Aceh	79
Gambar 24 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat SKIPM Aceh Tahun 2025.....	80
Gambar 25 Piagam Penghargaan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	83
Gambar 26 Sertifikat Penerapan ISO 9001:2015 SKIPM Aceh	84
Gambar 27 Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2025	85
Gambar 28 Data Monev Keuangan SKIPM Aceh Tahun 2025	86
Gambar 29 Data Monev BAPPENAS Tahun 2025	87

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, SKIPM Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Aceh tahun 2025 seluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) SKIPM Aceh tahun 2025 adalah sebesar 113,52 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerjaku dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 15 indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Dari seluruh indikator kinerja yang dimiliki telah tercapai sesuai dengan target dan atau melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan nilai posisi akhir. Nilai NKO tersebut ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Aceh sampai akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2025 telah sebesar tercapai 100 % (persentase capaian setara dengan 120 %).
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2025 telah tercapai sebesar 100 % (persentase capaian setara dengan 120 %).
 - c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebanyak 1 lokasi, sampai dengan akhir tahun 2025 telah tercapai 1 lokasi (persentase capaian setara dengan 100 %).
 - d. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 99 %, sampai dengan akhir tahun 2025 telah tercapai 100 % (persentase capaian setara dengan 101,01 %).

2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target nilai 75, pada akhir tahun 2025 tercapai nilai sebesar 86,91 (persentase capaian setara dengan 115,88 %).
 - b. ']]]] 75, pada akhir tahun 2025 tercapai nilai sebesar 89,75 (persentase capaian setara dengan 119,67 %).
3. Pencapaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target senilai 92, pada akhir tahun 2025 tercapai nilai sebesar 98,99 (persentase capaian setara dengan 107,60 %).
 - b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target senilai 71,50, pada akhir tahun 2025 tercapai nilai sebesar 100 (persentase capaian setara dengan 120 %).
 - c. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target sebesar 100 %, pada akhir tahun dapat 2025 tercapai sebesar 100 % (persentase capaian setara dengan 100 %).
 - d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target indeks sebesar 82, pada akhir tahun 2025 tercapai sebesar 88 (persentase capaian setara dengan 107,32 %).
 - e. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target nilai sebesar 86, pada akhir tahun 2025 tercapai sebesar 89,35 (persentase capaian setara dengan 103,90 %).
 - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target sebesar 85 %, pada akhir tahun 2025 dapat tercapai sebesar 100 % (persentase capaian setara dengan 117,65 %).
 - g. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target sebesar 76 %, pada akhir tahun 2025 dapat tercapai sebesar 100 % (persentase capaian setara dengan 120 %).

- h. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target sebesar 70 %, pada akhir tahun 2025 dapat tercapai sebesar 86,03 % (persentase capaian setara dengan 120 %).
- i. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target indeks senilai 3,36, dapat tercapai sebesar 3,85 (persentase capaian setara dengan 114,58 %).

Realisasi anggaran Stasiun KIPM Aceh sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp 4.760.696.355,- atau setara dengan 99,44 % dari alokasi anggaran pagu revisi sebesar Rp. 4.787.744.000,-. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap aktivitas, kebijakan, serta hasil akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban setiap instansi pemerintah untuk memberikan laporan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan sumber daya publik secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan asas akuntabilitas tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini memuat capaian kinerja utama, realisasi target, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya laporan kinerja yang akuntabel, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang serta sebagai alat untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result-based management*). Oleh karena itu, penguatan asas akuntabilitas melalui pelaporan kinerja yang transparan dan akurat merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh. Selain itu untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Dalam rangka mendukung visi BPPMHKP yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Stasiun KIPM Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi hingga pada tahun 2025 dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2025 SKIPM Aceh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai baik ASN maupun Non ASN. Adapun struktur organisasi SKIPM Aceh dapat dilihat dalam Gambar 1. sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2025



1.2. Arah Kebijakan Isu Strategis

Renstra KKP (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk periode 2025-2030 secara umum fokus pada beberapa area utama, seperti:

1. Peningkatan Kualitas SDM:

- Meningkatkan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan inovasi.
- Mengembangkan SDM yang kompeten dan profesional di berbagai bidang kelautan dan perikanan.

2. Pengembangan Inovasi dan Riset:

- Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi dan riset.

3. Peningkatan Keberlanjutan:

- Meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Mencegah dan mengurangi pencemaran laut, serta melindungi ekosistem laut.

4. Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan:

- Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.
- Menciptakan lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan.
- Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan perikanan.

5. Penanganan Sampah Plastik:

- Mengelola sampah plastik secara berkelanjutan melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Renstra KKP akan menjadi pedoman bagi KKP dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam periode 2025-2030 untuk mencapai visi dan misi pemerintah

1.3 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja BPPMHKP Aceh sampai akhir tahun 2025. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPMHKP Aceh sampai akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sejalan dengan *Asta Cita* Presiden Indonesia pada poin dua dan lima. Poin dua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Poin lima adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Oleh karena itu visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diselaraskan dengan *Asta Cita*:

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

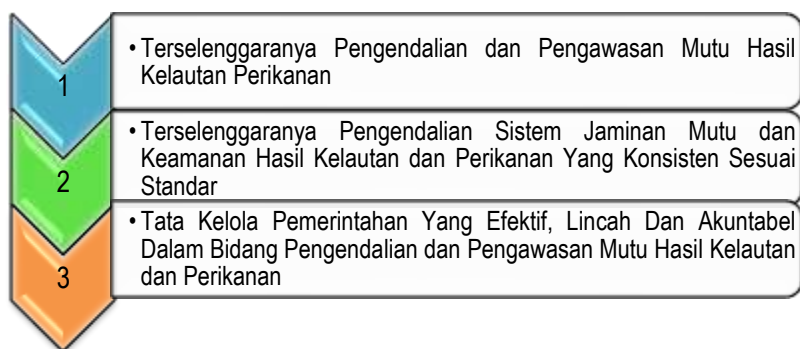
"Menjadi kementerian yang unggul dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberagaman hayati laut, serta memajukan ekonomi biru Indonesia."

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan
 - Mendorong pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan untuk memastikan ekosistem laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Nelayan
 - Memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses pasar, serta kebijakan yang berpihak pada mereka.
3. Memajukan Industri Perikanan dan Kelautan yang Inovatif
 - Mendorong riset dan pengembangan dalam sektor kelautan dan perikanan agar dapat menciptakan produk dan teknologi baru yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

4. Mengembangkan Ekonomi Biru
 - Mendorong pemanfaatan potensi ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan, baik untuk sektor perikanan, pariwisata bahari, maupun energi laut.
5. Melindungi Keanekaragaman Hayati Laut
 - Mengambil langkah-langkah nyata untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati laut Indonesia sebagai kekayaan alam yang sangat penting bagi ekosistem global.
6. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Laut
 - Meningkatkan produksi perikanan dan produk kelautan yang aman, sehat, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan.

Gambar 2. Sasaran Strategis Tahun 2025



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 terdapat 15 Indikator kinerja yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi SKIPM Aceh dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Aceh guna mendukung manajemen internal BPPMHKP.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan kinerja ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada aplikasi “kinerjaku” tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

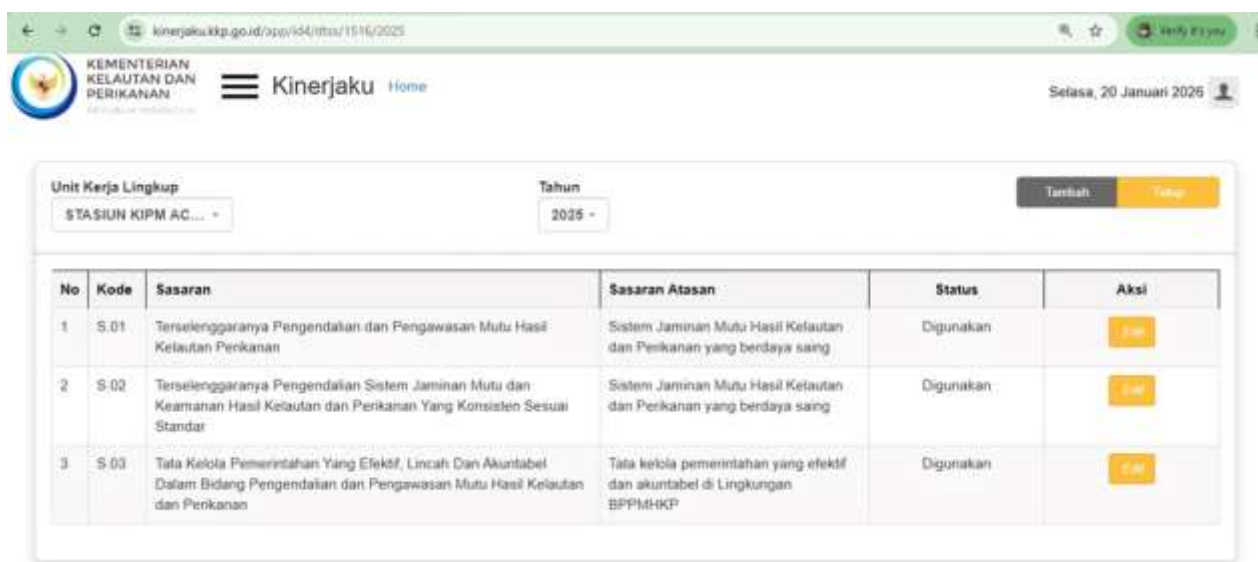
Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IK melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IK

stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Akuntabilitas kinerja organisasi BPPMHKP merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkup eselon I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BPPMHKP, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

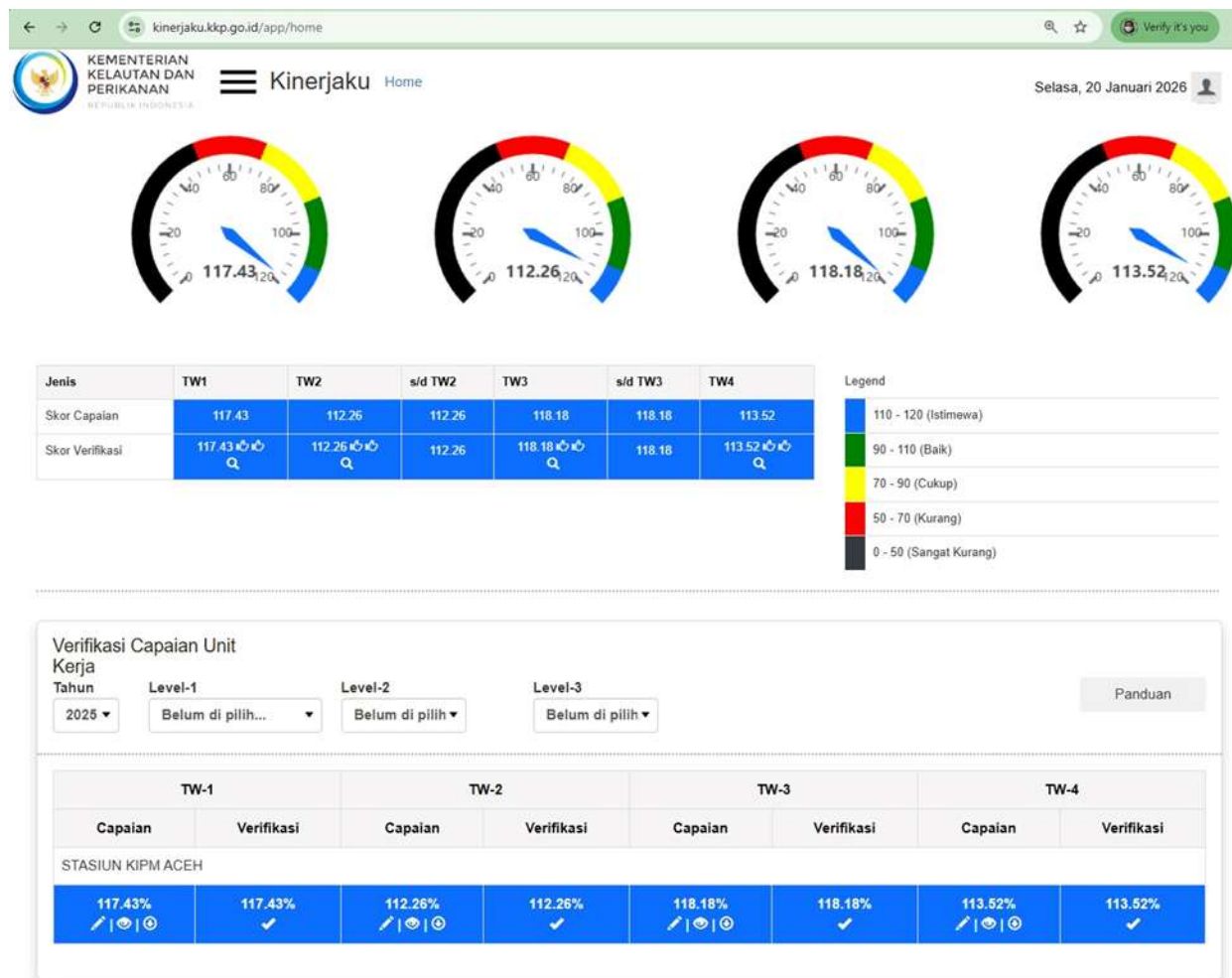
Gambar 3. Sasaran Kinerja Tahun 2025 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2025



No	Kode	Sasaran	Sasaran Atasan	Status	Aksi
1	S-01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	Digunakan	
2	S-02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	Digunakan	
3	S-03	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	Digunakan	

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2025)

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2025



(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2025)

Sampai periode akhir tahun 2025, unit kerja SKIPM Aceh memperoleh nilai pengukuran skor kinerja (NKO) Desember sebesar 113,52. Nilai ini berdasarkan perhitungan secara otomatis yang terporet melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat portal <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Pada aplikasi ini secara sistematis menjelaskan uraian indikator sasaran, sasaran indikator kinerja beserta pengukuran dan penilaiannya. Capaian atas 15 indikator kinerja SKIPM Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 5 Capture Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2025

kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/1516/12/2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN e-Kinerja Home Selasa, 20 Januari 2026

NKO Desember - 2025 Download

Unit Kerja : STASIUN KIPM ACEH
Skor Kinerja : 113.52

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 📄
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						110.25		
IKS.01.01	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 ✓ 📄 Data Dukung2 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	31-Dec-2025 15:31
IKS.01.02	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 ✓ 📄 Data Dukung2 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	31-Dec-2025 15:31
IKS.01.03	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 ✓ 📄 Data Dukung2 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	1,00	100,00	31-Dec-2025 15:31
IKS.01.04	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	99,00	100,00	101,01	31-Dec-2025 15:31
S.02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar						117.78		
IKS.02.01	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 ✓ 📄 Data Dukung2 ✓ 📄	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	86,91	115,88	31-Dec-2025 15:31

IKS 02.02	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Tambah Data Dukung 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	89,75	119,67	31-Dec-2025 15:31
S.03 Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							112,82		
IKS 03.01	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Data Dukung3   Tambah Data Dukung 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	98,98	107,80	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.02	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Data Dukung3   Tambah Data Dukung 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	71,50	100,00	120,00	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.03	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Tambah Data Dukung 	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.04	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Tambah Data Dukung 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	88,00	107,32	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.05	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Tambah Data Dukung 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	89,35	103,90	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Tambah Data Dukung 	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Tambah Data Dukung 	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78,00	78,00	100,00	120,00	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.08	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Data Dukung3   Tambah Data Dukung 	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	86,03	120,00	31-Dec-2025 15:31
IKS 03.09	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1   Data Dukung2   Data Dukung3   Tambah Data Dukung 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,38	3,38	3,85	114,58	31-Dec-2025 15:31
Total									

(Sumber : Aplikasi Kinerja KKP, 2025)

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

1. IKS. 01.01 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CBIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT. Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

1. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
3. Sertifikat Cara Pembutan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
4. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)

6. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan bagian penting dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. CPIB kapal yaitu persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diantaranya :

- Telah dilaksanakan inspeksi CPIB kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo dalam rangka sertifikasi CPIB diatas kapal pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2025.
- Pada tanggal 15 Juli 2025 telah dilakukan inspeksi sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal PPS Kutaradja terhadap kapal KM. Balia Baru yang berukuran 54 GT dengan parameter inspeksi pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di kapal dan standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan dikapal.
- SKIPM Aceh telah melakukan pendampingan terhadap buyer dan UPI dalam ekspor produk perikanan yaitu mempertemukan buyer dari Jepang dengan UPI Fisheries Indo Makmur pada 16 sampai 17 Juli 2025.
- SKIPM Aceh telah melakukan pendampingan percepatan layanan sertifikasi CBIB pada 5 Agustus 2025 dan penyuluh perikanan Kota Banda Aceh yang bertempat di Gampong Alue Deah Teungoh dengan komoditi udang vanname yang dibudidayakan secara tradisional.
- Pada tanggal 13 dan 14 Agustus SKIPM Aceh telah melakukan surveilan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pembenihan PT. Surya Windu Pertiwi di Kabupaten Bireuen dengan ruang lingkup komoditinya adalah Udang Vanname.
- Inspektur Mutu Badan Mutu KKP Aceh mengikuti peningkatan kapasitas atau pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) secara daring mulai 22 - 24 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh BRSDM KP.
- Pada bulan Desember kembali dilakukan kegiatan sertifikasi kapal di Kota Banda Aceh. Tim Inspektur Mutu BPPMHKP Aceh melaksanakan pelayanan penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di TPI Ulee lheu, Banda Aceh dalam masa libur Nataru 2025. Kegiatan inspeksi dilakukan pada 5 kapal penangkap ikan yaitu KM. Doa Bunda 001, KM. Doa Bunda 002, KM. Doa Bunda 003, KM. Doa Bunda 004 dan KM. Doa Bunda 005 dengan ukuran kapal masing-

masing sebesar 1 GT. Kapal-kapal ini adalah kapal penangkap gurita yang merupakan pemasok bahan baku ke UPI. Dalam kegiatan ini dilihat beberapa aspek yaitu :

1. Pembongkaran gurita dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat dan mempertahankan kondisi dingin.
 2. Standar fasilitas Penanganan dan Penyimpanan ikan di Kapal dan Palka Ikan.
 3. Aspek Standar Prosedur Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal
 4. Kegiatan inspeksi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya terus-menerus untuk mendorong seluruh pelaku usaha perikanan, khususnya kapal-kapal penangkap ikan, untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
- Koordinasi dengan tim Pusat Mutu Produksi Primer terkait sistem pelayanan dan kegiatan sertifikasi sektor mutu primer terus dilakukan dengan baik. Selanjutnya sehubungan dengan digitalisasi layanan sertifikasi kepada pelaku usaha, BPPMHKP telah melaksanakan pengembangan aplikasi SIAPMUTU untuk layanan sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). Terkait sistem tersebut telah dilaksanakan sosialisasi proses sertifikasi lingkup BPPMHKP pada tanggal 8 Desember 2025 dalam rangka penyebaran informasi serta peningkatan pemahaman bagi seluruh inspektur mutu dan petugas layanan publik.

Tabel 1 Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	100	-	70	100	120	70	120	70	120

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk.

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT

Tabel 2 Rekapitulasi Sertifikasi CPIB Kapal SKIPM Aceh Tahun 2025

NO	TANGGAL INSPEKSI	NAMA KAPAL	UKURAN KAPAL	GRADE SERTIFIKAT	NOMOR SERTIFIKAT
1	4 – 5 JUNI 2025	KM. DEK UZIA	16 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250210
2	4 – 5 JUNI 2025	KM. G. YOUKUO	15 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250211
3	4 – 5 JUNI 2025	KM. LAMPINEUNG UTAMA	13 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250212
4	4 – 5 JUNI 2025	KM. OKAZAKI	14 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250213
5	4 – 5 JUNI 2025	KM. SINAR INDAH 10	13 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250214
6	5 JULI 2025	KM. ATHA DROU	60 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250456
7	5 JULI 2025	KM. FAKTA BARU 02	57 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250457
8	6 JULI 2025	KM. BERINGIN BARU	60 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 250458
9	9 JULI 2025	KM. BALIA	59 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 250459
10	15 JULI 2025	KM. BALIA BARU	54 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250484
11	30 AGUSTUS 2025	KM. MUDA BALIA	59 GT	B	ID – CPIB – K – 11 - 250729
12	26 DESEMBER 2025	KM. DO'A BUNDA 001	1 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 251315
13	26 DESEMBER 2025	KM. DO'A BUNDA 002	1 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 251316
14	26 DESEMBER 2025	KM. DO'A BUNDA 003	1 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 251317
15	26 DESEMBER 2025	KM. DO'A BUNDA 004	1 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 251318
16	26 DESEMBER 2025	KM. DO'A BUNDA 005	1 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 251319

Tabel 3. Rekapitulasi Sertifikasi CPIB SKIPM Aceh Tahun 2025

NO	TANGGAL TERBIT	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	NOMOR SERTIFIKAT
1	14 Oktober 2015	PT. Swadaya Mitra Perkasa	9120211261081	Benih Udang Vanamei	ID-CPIB-11250123

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah permohonan masuk dari setiap jenis layanan sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer dibagi dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan dari layanan tersebut.

Pada periode tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah sebanyak 16 sertifikat dari 16 permohonan sertifikasi Cara Penangkapan Ikan Yang Baik (CPIB Kapal). Sedangkan capaian sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdapat 1 buah permohonan dengan capaian 1 sertifikat. Sehingga capaian indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah 100 %..

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru setelah BPPMHKP dibentuk. Berdasarkan data pada aplikasi kinerjaku, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 adalah sebesar 100 %, sama dengan capaian periode sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra adalah sama, sebesar 100 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Upaya yang dilakukan oleh SKIPM Aceh dalam upaya mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi, update data dan informasi, serta referensi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pada masa transisi SOTK sampai dengan saat ini, diharapkan

dengan kerja sama seluruh sumber daya yang ada dan koordinasi dengan stakeholder terkait dapat meminimalisir kegagalan pencapaian indikator kinerja.

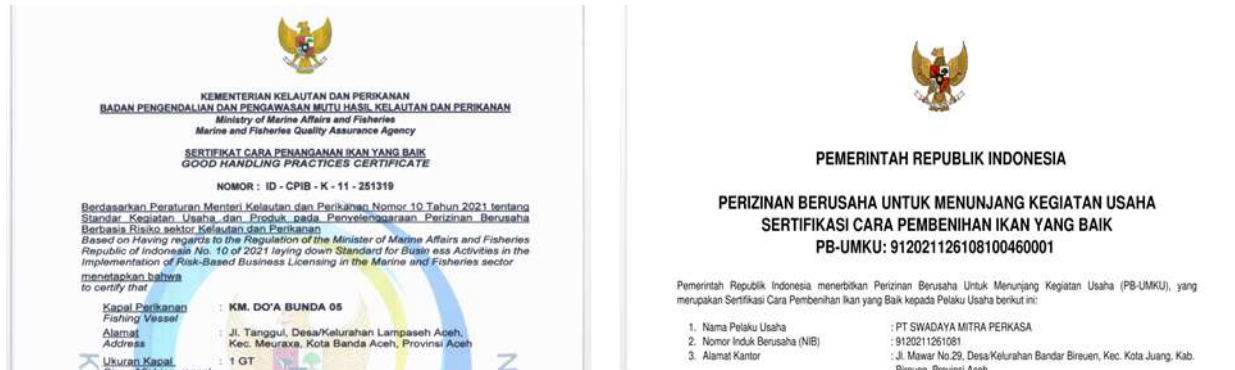
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan personil non PNS serta partisipasi penyuluh perikanan. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan Sektor Produksi Primer.

Gambar 6 Rangkaian Kegiatan Sektor Produksi Primer Tahun 2025



Gambar 7 Sertifikat CPIB Kapal dan CPIB Benih SKIPM Aceh Tahun 2025



6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan yang terkena blokir anggaran

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini dengan melaksanakan inspeksi, survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan, sosialisasi peraturan terkait kepada pengguna jasa, melaksanakan program yang telah direncanakan, koordinasi dengan Pusat Produksi Primer, koordinasi internal, koordinasi dengan *stakeholder* terkait, koordinasi dengan penyuluh perikanan serta unit pelaksana teknis eselon I terkait.

2. IKS. 01.02 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual. Berikut formula perhitungan indikator kinerja ini :

$$\% X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP/SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

1. Capaian Indikator Utama

Tabel 3 Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	106,66	100	70	100	120	70	120	70	120

Layanan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Produk (SKP), yang menjadi tugas baru telah dilaksanakan oleh SKIPM Aceh pada Tahun 2025. Berikut data kegiatan HACCP dan data kegiatan SKP Tahun 2025.

Tabel 4 Data Kegiatan HACCP Tahun 2025 Di HACCP Online

No	No.Sertifikat	Produk	Tgl.Terbit	BerlakuSampai	No	Nama	Status Produk	Grade	Status Sertifikat
1	279/PMHA.CC/IPS/03/25	Fresh Demersal Fish	19-Mar-25	19-Mar-27	1	FISHENARY INDO MAKMUR, CV	Baru	B	BERLAKU
2	233/PMHA.CC/IPS/03/25	Fresh Pelagic Fish	17-Mar-25	17-Mar-27			Baru	B	BERLAKU
3	234/PMHA.CC/IPS/03/25	Fresh Tuna	17-Mar-25	17-Mar-27			Baru	B	BERLAKU
4	280/PMHA.CC/IPB/03/25	Frozen Cephalopods	19-Mar-25	19-Mar-27			Baru	B	BERLAKU
5	281/PMHA.CC/IPB/03/25	Frozen Demersal Fish	19-Mar-25	19-Mar-27			Baru	B	BERLAKU
6	235/PMHA.CC/IPB/03/25	Frozen Pelagic Fish	17-Mar-25	17-Mar-27			Baru	B	BERLAKU
7	282/PMHA.CC/IPB/03/25	Frozen Shrimp	19-Mar-25	19-Mar-27			Baru	B	BERLAKU
8	236/PMHA.CC/IPB/03/25	Frozen Tuna	17-Mar-25	17-Mar-27			Baru	B	BERLAKU
9	374/PMHA.CC/IPB/09/25	Frozen Demersal Fish	29-Sep-25	29-Sep-27	3	YAKIN PASIFIK TUNA, PT	Penambahan Ruang Lingkup	B	BERLAKU
10	375/PMHA.CC/IPB/09/25	Frozen Tuna	29-Sep-25	29-Sep-27			Penambahan Ruang Lingkup	B	BERLAKU
11	089/PMHA.CC/IPB/11/25	Frozen Cephalopods	10-Nov-25	10-Nov-27	2	KING OF MILK FISH, CV	Perpanjangan	B	BERLAKU
12	090/PMHA.CC/IPB/11/25	Frozen Demersal Fish	10-Nov-25	10-Nov-27			Perpanjangan	B	BERLAKU
13	092/PMHA.CC/IPB/11/25	Frozen Milkfish	10-Nov-25	10-Nov-27			Perpanjangan	B	BERLAKU
14	091/PMHA.CC/IPB/11/25	Frozen Pelagic Fish	10-Nov-25	10-Nov-27			Perpanjangan	B	BERLAKU
15	093/PMHA.CC/IPB/11/25	Frozen Shrimp	10-Nov-25	10-Nov-27			Perpanjangan	B	BERLAKU
16	094/PMHA.CC/IPB/11/25	Frozen Soft Shell Crab	10-Nov-25	10-Nov-27			Perpanjangan	B	BERLAKU
17	193/PMHA.CC/IPB/12/25	Frozen Cephalopods	22-Dec-2025	22-Dec-2027	4	ACEH LAMPULO JAYA BAHARI, PT	Penambahan Ruang Lingkup	A	BERLAKU
18	194/PMHA.CC/IPB/12/25	Frozen Pelagic Fish	22-Dec-2025	22-Dec-2027			Perpanjangan	A	BERLAKU

Tabel 5 Data Kegiatan Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) Tahun 2025

No	Nama UPI	Produk ID	Produk EN	No SKP	Tgl Terbit / Expired	Rank	Alamat	Provinsi
1	CV. Fishernary Indo Makmur	Udang Beku	Frozen Shrimp	35833/11SKP/BK/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
2	CV. Fishernary Indo Makmur	Ikan Demersal Beku (Kakap Putih, Bawal Hitam, Kaniapu, Layur, Bawal, Kakap Merah, Layaran, Ayam-ayam)	Frozen Demersal Fish (Baramundi, Black Pomfret, Grouper, Harital, Pomfret, Red Snapper, Sailfish, Starry Tigerfish)	35834/11SKP/BK/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
3	CV. Fishernary Indo Makmur	Cephalopoda Beku (Gurita)	Frozen Cephalopoda (Octopus)	35835/11SKP/BK/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
4	CV. Fishernary Indo Makmur	Tuna Beku	Frozen Tuna	35836/11SKP/BK/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
5	CV. Fishernary Indo Makmur	Tuna Segar	Fresh Tuna	35838/11SKP/SG/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
6	CV. Fishernary Indo Makmur	Ikan Demersal Segar (Kakap Putih, Bawal Hitam, Kaniapu, Layur, Bawal, Kakap Merah, Layaran, Ayam-ayam)	Fresh Demersal Fish (Baramundi, Black Pomfret, Grouper, Harital, Pomfret, Red Snapper, Sailfish, Starry Tigerfish)	35839/11SKP/SG/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
7	CV. Fishernary Indo Makmur	Ikan Pelagis Beku (Baby Tuna, Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggiri)	Frozen Pelagic Fish (Baby Tuna, Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel)	35840/11SKP/BK/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
8	CV. Fishernary Indo Makmur	Ikan Pelagis Segar (Baby Tuna, Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggiri)	Fresh Pelagic Fish (Baby Tuna, Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel)	35837/11SKP/SG/I/2025	26-02-2025 / 26-02-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
9	UD. RBA	Ikan Pindang	Boiled Fish	36370/11SKP/LN/I/2025	26-03-2025 / 26-03-2027	B	Jln. PLTA Sepakat Desa Peseluk Pesimbe Kecamatan Deleng Pahlisan Kab. Aceh Tenggara Kel. Peseluk Pesimbe, Kec. Deleng Pahlisan, Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh
10	CV. Permata Laut Nusantara	Ikan Kayu	Kabuobushi	36590/11SKP/AS/I/2025	23-04-2025 / 23-04-2027	B	Jln. Syah Kuala Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Kel. Suak Sigadeng, Kec. Johan Pahlawan , Kabupaten Aceh Barat	Aceh
11	CV. King Of Midkiah	Rejungan Segar	Fresh Swimming Crab	36716/11SKP/SG/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
12	CV. King Of Midkiah	Cephalopoda Segar (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Fresh Cephalopoda (Cuttlefish, Octopus, Squid)	36717/11SKP/SG/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
13	CV. King Of Midkiah	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Frozen Cephalopoda (Cuttlefish, Octopus, Squid)	36718/11SKP/BK/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
14	CV. King Of Midkiah	Ikan Demersal Beku (Bawal Hitam, Maling, Sembilang, Manyung, Layur, Sukang, Bawal, Kakap)	Frozen Demersal Fish (Black Pomfret, Conger Eel, Eel Tailed Catfish, Giant Catfish, Harital, Leatherjacket, Pomfret, Snapper)	36719/11SKP/BK/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
15	CV. King Of Midkiah	Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggiri)	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel)	36720/11SKP/BK/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
16	CV. King Of Midkiah	Kepting Lunak Beku	Frozen Soft Shell Crab	36721/11SKP/BK/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
17	CV. King Of Midkiah	Ikan Pelagis Segar (Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggiri)	Fresh Pelagic Fish (Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel)	36722/11SKP/SG/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
18	CV. King Of Midkiah	Ikan Demersal Segar (Bawal Hitam, Maling, Sembilang, Manyung, Layur, Sukang, Bawal, Kakap)	Fresh Demersal Fish (Black Pomfret, Conger Eel, Eel Tailed Catfish, Giant Catfish, Harital, Leatherjacket, Pomfret, Snapper)	36723/11SKP/SG/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
19	CV. King Of Midkiah	Udang Beku	Frozen Shrimp	36724/11SKP/BK/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
20	CV. King Of Midkiah	Standeng Beku	Frozen Milkfish	36725/11SKP/BK/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
21	CV. King Of Midkiah	Lobster Beku	Frozen Lobster	36726/11SKP/BK/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
22	CV. King Of Midkiah	Udang Segar	Fresh Shrimp	36727/11SKP/SG/I/2025	30-04-2025 / 30-04-2027	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
23	PT. Yakin Pasifik	Tuna Saku Beku	Frozen Tuna Saku	37079/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
24	PT. Yakin Pasifik	Tuna Loin Beku	Frozen Tuna Loin	37080/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
25	PT. Yakin Pasifik	Tuna Cubes Beku	Frozen Cubes Tuna	37081/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
26	PT. Yakin Pasifik	Steak Tuna Beku	Frozen Tuna Steak	37082/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
27	PT. Yakin Pasifik	Ikan Demersal Uluh Beku	Frozen Whole Demersal Fish	37083/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
28	PT. Yakin Pasifik	Filet Ikan Demersal Beku (Kambing-kambing, Kaniapu, Layur, Kakatas, Bawal, Kakap Merah, Kuri, Buntal Durian)	Frozen Demersal Fish Filet (Emperor Angelfish, Grouper, Harital, Parrotfish, Pomfret, Red Snapper, Treadfin Bream, Diodon Holocentrus)	37084/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
29	PT. Yakin Pasifik	Ikan Demersal Beku (Kambing-kambing, Kaniapu, Layur, Kakatas, Bawal, Kakap, Kuri, Buntal Durian)	Frozen Demersal Fish (Emperor Angelfish, Grouper, Harital, Parrotfish, Pomfret, Snapper, Treadfin Bream, Diodon Holocentrus)	37085/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
30	PT. Yakin Pasifik	Tuna Beku	Frozen Tuna	37086/11SKP/BK/V/2025	26-05-2025 / 26-05-2027	A	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
31	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari	Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Layang, Cakalang, Tuna Sirip Kuning)	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Yellowfin Tuna)	40081/11SKP/BK/X/2025	29-10-2025 / 29-10-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 16, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
32	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari	Gurita Beku	Frozen Octopus	40082/11SKP/BK/X/2025	29-10-2025 / 29-10-2027	A	Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 16, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Aceh
33	CV. Aceh Fish Jelly	Produk Perikanan Bersifat Tambah Beku	Frozen Value Added Fish Product	4660/11SKP/BK/X/2025	08-12-2025 / 08-12-2027	A	Jl. Rama Seifa, Loning Tgk. Lamcong No. 48, Kel. Lampateh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh	Aceh

1. A = HACCP

- Permohonan HACCP Tahun 2025 = 18
- HACCP Yang Diterbitkan Tahun 2025 = 18
- Persentase Capaian HACCP Tahun 2025 : $(A) = \frac{18}{18} \times 100 \% = 100 \%$

2. B = SKP

- Permohonan Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) Tahun 2025 = 33
- Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) Yang Diterbitkan Tahun 2025 = 33
- Persentase Capaian SKP Tahun 2025 : $(B) = \frac{33}{33} \times 100 \% = 100 \%$

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 sebagai berikut:

$$\% X = \frac{100+100}{2} \times 100 \%$$

$$\% X = 100 \%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Sesuai dengan data kinerja, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh lebih kecil dibandingkan tahun 2024 sebesar 106,66 %. Hal ini karena pada tahun 2024 dipergunakan nilai target dari pusat BPPMHKP dibandingkan dengan sertifikat yang terbit, sedangkan pada tahun 2025 dipergunakan asumsi rumus permohonan. Pada tahun 2020 sampai 2023 tidak terdapat indikator kinerja ini dalam dokumen kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra 2025 – 2029 sama besarnya.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat terwujud dengan penerapan rencana aksi dan koordinasi internal dan eksternal.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik pada kegiatan inspeksi dan verifikasi maupun monitoring dan evaluasi secara digital.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun 35.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.198.960,- atau senilai hampir 100 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku HACCP dan SKP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* dengan pihak UPI. Berikut dokumentasi kegiatan sektor produksi pasca panen tahun 2025

Gambar 8 Kegiatan Sektor Produksi Pasca Panen Tahun 2025



3. IKS. 01.03 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan.

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan *supplier/miniplant*, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan di pasar tradisional dan modern yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional dan pasar modern. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik.

**Gambar 9 Kegiatan Monitoring Penjaminan Mutu Perikanan Domestik
di Kota Banda Aceh**



Berdasarkan hasil pengolahan data penilaian jaminan mutu yang mencakup nilai sarana dan prasarana dan nilai pengujian produk tahun 2025 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada rumus dan perhitungan di bawah ini :

$$\text{Nilai Jaminan Mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Nilai Penjaminan Mutu Tahun 2025 Semester I

- Nilai sarana prasarana = 50,00
- Nilai pengujian produk = 94,39
- Nilai Jaminan Mutu = $(60\% \times 50,00) + (40\% \times 94,39) = 67,76 \%$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Banda Aceh pada semester I tahun 2025, 67,76 % dalam kriteria yang memenuhi persyaratan sedangkan 32,34 % dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

Nilai Penjaminan Mutu Tahun 2025 Semester II

- Nilai sarana prasarana = 50,00
- Nilai pengujian produk = 94,10
- Nilai Jaminan Mutu = $(60\% \times 50,00) + (40\% \times 94,10) = 67,64 \%$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Banda Aceh pada semester II tahun 2025, 67,64 % dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 32,36 % dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

1. Capaian Indikator Kinerja

Monitoring penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2025 dilakukan monitoring penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan "Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun

2017 dengan lokasi pelaksanaan di 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh dengan lokus PPS Kutaradja dan Pasar Seutui. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan pada tiap semester.

Tabel 6 Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	100	1	1	1	100

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja pada periode sebelumnya menggunakan satuan lokasi dan cara perhitungan yang berbeda dengan periode tahun 2025. Berdasarkan tabel data realisasi indikator kinerja ini serta data pada kinerjaku pada tahun 2024 menggunakan pendekatan persentase bukan lokasi pengawasan mutu. Jika diperbandingkan dengan data tahun 2024 kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi kabupaten/kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh yang terdapat pada dokumen Renstra adalah sama besarnya.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Perlu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. SKIPM Aceh berusaha dan

berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melibatkan personil fungsional umum dengan pengalaman yang cukup, serta dengan persiapan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2025 sebagian besar mengalami blokir anggaran. Angka realisasi anggaran dapat diperhitungkan dengan pagu efektif pasca blokir akhir tahun sebesar Rp. 5.370.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.5.292.000,- atau setara dengan 98,55 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat, koordinasi dan rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan periode selanjutnya.

4. IKS 01.04 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Berikut formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 :

$$x = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah ditentukan target dan periodenya. Pada periode akhir tahun 2025 indikator ini dilakukan perhitungan. Data Ekspor SKIPM Aceh Tahun 2025 Periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember dilakukan perhitungan. Berikut data dan dokumentasi kegiatan ekspor Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025.

Tabel 7 Data Ekspor SKIPM Aceh Tahun 2025

No.	NOMOR AJU	NO SMKHP	TGL SMKHP	UPI	NEGARA	NM DAGANG	JUMLAH	SATUAN	RP	USD
1	AE41.0III202500008	41.0-S-00010-2025	26/03/2025 07:00:00	PT Perikanan Indonesia Unit Simeuleu	Japan	Frozen Octopus	16100	kgm	1.585.947.600	95769,78
2	E/E41.0I20250117/0000002	41.0-00001-2025	17/01/2025 13:07:51	PT. Perikanan Indonesia Unit Simeuleu	Japan	Frozen Octopus	15200	kg	1.328.708.000	81055,35
3	E/E41.0I20250214/0000003	41.0-00002-2025	14/02/2025 17:27:49	PT. Perikanan Indonesia Unit Simeuleu	Japan	Frozen Octopus	15018,5	kg	1.396.720.500	85131,62
4	AE41.0IV202500009	41.0-S-00011-2025	02/05/2025 16:00:19	PT Perikanan Indonesia Unit Simeuleu	Japan	Frozen Octopus	6960	kgm	617.314.500	37556,4
5	AE41.0VI202500012	41.0-S-00012-2025	26/06/2025 17:08:55	PT Perikanan Indonesia Unit Simeuleu	Japan	Frozen Octopus	24040	kgm	2.361.641.520	145690,4
6	AE46.0VIII202502659	41.0-S-00013-2025	28/08/2025 14:51:21	PT Perikanan Indonesia Unit Simeuleu	Japan	Frozen Octopus	24000	KGM	2.220.337.100	135750,6
7	AE41.0IX202500014	41.0-S-00015-2025	11/09/2025 11:14:44	CV. FishenaryIndo Makmur	Japan	Frozen Octopus	24000	KGM	2.111.244.139	128288,5
8	AE41.0IX202500016	41.0-S-00016-2025	30/09/2025 16:59:48	CV. FishenaryIndo Makmur	Japan	Frozen Octopus	25000	KGM	2.251.152.000	134864,1
9	AE41.0X202500019	41.0-S-00018-2025	20/10/2025 10:04:30	PT Perikanan Indonesia Unit Simeuleu	Japan	Frozen Whole Clean Octopus	23960	KGM	2.364.133.200	142546,5
10	AE41.0XI202500020	41.0-S-00019-2025	07/11/2025 15:51:15	CV. FishenaryIndo Makmur	Japan	Frozen Octopus	25000	KGM	2.362.883.860	141456,2
11	AE41.0XI202500021	41.0-S-00020-2025	25/12/2025 16:50:28	CV. FishenaryIndo Makmur	Japan	Frozen Octopus	25000	KGM	2.568.486.000	153187

Gambar 10 Koordinasi dan Pendampingan Ekspor Tahun 2025



Tabel 8 Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja SKIPM Aceh pada periode tahun 2024, terdapat indikator kinerja terkait ekspor yaitu Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina dengan target sebesar 99 % dan capaian sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan Renstra adalah sama.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 telah memenuhi target. Keberhasilan capaian telah diupayakan maksimal melalui koordinasi internal, koordinasi dengan Pusat BPPMHKP dan UPI. Selain itu telah dilakukan pendampingan terhadap *buyer* dan UPI yang akan melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dari wilayah Aceh.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kinerja indikator ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat program penggunaan teknologi atau sistem informasi SIAP MUTU untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan ekspor .

6. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan terkait ekspor diantaranya yaitu Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor dengan pagu anggaran dan kegiatan Produk

Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impor-nya namun mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan koordinasi lingkup internal BPPMHKP serta melakukan sosialisasi eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait. Berikut dokumentasi kegiatan pendampingan UPI dalam melakukan ekspor tahun 2025.

5. IKS 02.01 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase, berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. SKIPM Aceh sebagai salah satu UPT BPPMHKP telah terakreditasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO:IEC 17025:2017. Status akreditasi bagi laboratorium bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja, hal ini berdampak pada pelayanan terhadap pengguna jasa layanan.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;

6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen.

Berikut formula perhitungan indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

X = Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, .., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Tabel 9 Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	-	-	-	-	-	-	75	86,91	115,88	75	115,88	75	115,88

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 dilaksanakan surveilan dan witness secara remote/online penerapan ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional di SKIPM Aceh pada tanggal 12 Maret 2025. Pembukaan oleh Kepala SKIPM Aceh dan dihadiri seluruh bidang SMMI baik teknis maupun administrasi. Tim Asesmen KAN tersebut adalah Ibu Mila Septiana W (Bidang Manajemen) dan Ibu Tri Pratiwi (Bidang teknis biologi dan fisik / Organoleptik). Dari hasil surveilen dan witness melalui remote ditemukan ketidaksesuaian dengan kategori 2 dan observasi. Sebelum batas waktu yang telah ditentukan seluruh ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti oleh tim dengan baik dan diterima oleh KAN. Melalui surat resmi Nomor 2379/3.b1/LP/05/2025 tanggal 14 Mei 2015 KAN

memberitahukan hasil surveilan yang telah dilakukan dan telah memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi kepada laboratorium penguji SKIPM Aceh dengan nomor akreditasi : LP-713-IDN. Berikut dokumentasi sertifikat ISO/IEC SNI 17025:2017 dan kegiatan *surveilan* dan *witness* tersebut.

Gambar 11 Pelaksanaan dan Sertifikat Kegiatan Surveilan dan Witness SNI ISO/IEC 17025:2017





KAN
Komite Akreditasi Nasional

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-713-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Alamat : Jl. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh Telp. : (0651) 636227 E-mail: skipm.aceh@gmail.com		Amd-1 Masa berlaku: 24 Januari 2022 s/d 23 Januari 2027 Amendemen ke-1: 14 Mei 2025		
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi/Fisika	Ikan dan Produk perikanan (segar dan beku)	Salmonella sp.	ISO 6579-1:2017	
		Echerchia coli	SNI 2332.1:2015	
		Angka Lempeng Total	SNI 2332.3:2015	
		Sensori/Organooleptik	SNI 2346:2015	
	Ikan air laut segar (tuna, kakap, kerapu, tongkol, tuna loin, udang, cumi-cumi) dan ikan air laut beku (lobster, udang, tuna, cumi-cumi)			

Agar laboratorium yang telah terakreditasi terbukti menerapkan sistem manajemen mutu yang telah diberikan, maka dilakukan verifikasi penerapannya. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BPPMHKP tahun 2025, telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di beberapa UPT sampling dengan sistem remote verification maupun verifikasi langsung pada periode masing-masing triwulan sebagai berikut :

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar :

Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV = $(89,91+85,75+88,24+83,72) / 4 = 86,91$.

Penyampaian Informasi resmi terkait hasil capaian kinerja sistem manajemen mutu sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah diberikan berdasarkan surat nomor B. 35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 (terlampir di data dukung 1). Dalam hal ini SKIPM Aceh tidak menjadi UPT sampling yang dilakukan penilaian sehingga menggunakan nilai rata-rata yang telah diperoleh oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan nilai capaian sebesar 81,35. Pada tahun 2024 Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP telah melakukan pengukuran lingkup UPT terhadap nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebanyak unit sampling 13 laboratorium dengan capaian nilai sebesar 81,35. Pada periode tahun 2025 berdasarkan surat dari Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP indikator kinerja ini tercapai sebesar 86,91 dari target nilai 75, atau setara dengan 115,88 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan. Pada periode tahun 2025 perbandingan dengan dokumen renstra terbaru adalah sama besarnya.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah diupayakan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan mengikuti pelaksanaan asesmen dan memenuhi seluruh klarifikasi yang diperlukan sehingga kembali mendapatkan status akreditasi kepada Stasiun KIPM Aceh dengan No. Akreditasi LP-713-IDN dengan ruang lingkup sesuai dengan lampiran yang diperoleh.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung dengan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian yang memiliki anggaran terbaru yaitu sebesar Rp. 89.500.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 89.498.200,- atau setara dengan hampir 100 % dari pagu anggaran terbaru.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan pelaksanaan program dan rencana kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat BPPMHKP.

6. IKS 02.02 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumberdaya
6. Persyaratan Proses;

Berikut formula perhitungan indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

X = Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 BPPMHKP diamanahkan sebagai Otoritas Kompeten (Lembaga Inspeksi) untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Persyaratan Sistem Manajemen SKIPM Aceh sebagai salah satu UPT BPPMHKP telah terakreditasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17020:2012. Status akreditasi bagi laboratorium bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja, hal ini berdampak pada pelayanan terhadap pengguna jasa layanan.

Pada tahun 2024 SKIPM Aceh telah melaksanakan re-akreditasi Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 bersama Komisi Akreditasi Nasional (KAN) dan telah menyelesaikan seluruh tahapan yang telah ditentukan. Sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Akreditasi dengan nomor LI-153-IDN yang berlaku sampai dengan 18 November 2029. Dengan tipe lembaga inspeksi tipe A, pada bidang inspeksi dan sub bidang inspeksi: perikanan (surveilans HACCP).

Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan surveilans atau inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 di SKIPM Aceh oleh KAN, namun tetap dilaksanakan kegiatan administrasi dan belanja bahan serta barang untuk mendukung kegiatan terkait.

Selain itu, agar laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 terbukti menerapkan sistem manajemen mutu yang telah diberikan, maka dilakukan verifikasi penerapannya. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BPPMHKP tahun 2025, telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di beberapa UPT sampling dengan sistem remote verification maupun verifikasi langsung pada periode masing-masing triwulan. Penyampaian Informasi resmi terkait hasil capaian kinerja sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah diberikan berdasarkan surat nomor B. 35/BPPMHKP.2/TU.210/II/2026 tanggal 7 Januari 2026 (terlampir di data dukung 1). Dalam hal ini SKIPM Aceh tidak menjadi UPT sampling yang dilakukan penilaian sehingga menggunakan nilai rata-rata yang telah diperoleh oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP. Sesuai dengan tangkap layar pada surat sebagai berikut:

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar :
Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV = $(93,22+89,81+86,53+89,44) / 4 = 89,75$

Sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 SKIPM Aceh telah diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2024 sesuai dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 12 Sertifikat SNI ISO/IEC 17020:2012 SKIPM Aceh





LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LI-153-IDN

LEMBAGA INSPEKSI - SNI ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)

Nama LSI	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh	Masa Berlaku
Alamat	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Sintang Bintang, Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam	19 November 2024
	Telp. (061) 536227 Email: kan@kan.go.id	s.d.
		18 November 2028

Lingkup Akreditasi

Tipe Lembaga Inspeksi	Produk/ Jasa/ Instalasi	Bidang Inspeksi dan sub-bidang Inspeksi	Jenis Inspeksi	Metode Kerja yang digunakan	Standar, metode inspeksi, teknik yang dasar	Keterangan
Type A	Perikanan Perikanan	Perikanan HACCP	- Sistem Pengawasan HACCP - Dasar audit - Audit dokumen dan catatan pemantauan - Program Pemantauan - Dasar (PMD), Pengawasan - Dasar HACCP dan - Pengawasan - Keterbacaan - Pengawasan visual - Isolasi dan pengujian - pengawasan Program - Pengawasan Dasar (PMD) - Pengawasan Sistem - HACCP dan Pengawasan - Keterbacaan - Pengawasan/pengawasan - parameter Operasional - Profesional Program (OPMP) dan - Control Point (CCP) - Keterbacaan personel	- PLS 3.1000PM - Acch - KT 3.1000PM - Acch	Peraturan Kementerian Perikanan dan Perikanan atau peraturan 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/11/MEN/2018 10 Tentang Pengawasan Dalam Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2017 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perikanan, Budidaya Perikanan, Mutu	

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LI-153-IDN
LEMBAGA INSPEKSI - SNI ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)

Tipe Lembaga Inspeksi	Produk/ Jasa/ Instalasi	Bidang Inspeksi dan sub-bidang Inspeksi	Jenis Inspeksi	Metode Kerja yang digunakan	Standar, metode inspeksi, teknik yang dasar	Keterangan
			LSI - verifikasi tindakan perbaikan - Evaluasi hasil survei oleh Tim Teknis		SISO Kuisiul dan Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perikanan Budidaya Perikanan, Mutu	

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilakukan perhitungan. Selain itu pada tahun 2025 SKIPM Aceh telah menyelesaikan prosedur administrasi pembayaran iuran tahunan dan mengikuti arahan dari pusat.

Tabel 11 Target dan Realisasi IKS 02.02 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	-	-	-	-	84,35	-	75	89,75	119,67	75	89,75	75	89,75

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2024 dilakukan juga pengukuran nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebanyak 14 lembaga inspeksi dengan capaian nilai sebesar 84,85. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, kembali dilakukan perhitungan nilai capaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP yang dapat dipergunakan oleh Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 menggunakan capaian rata-rata yaitu sebesar 89,75 atau setara dengan 119,67 % dari target sebesar 75 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh terus diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan. Pada periode tahun 2025 perbandingan dengan dokumen renstra terbaru dengan capaian kinerja tahun 2025 adalah sama.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah diupayakan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan mengikuti arahan dari pusat BPPMHKP.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung dengan kegiatan Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi yang memiliki anggaran setelah efisiensi yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 34.998.400,- atau hampir setara dengan 100 % dari pagu anggaran terbaru.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah dengan pelaksanaan program dan rencana kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat BPPMHKP.

7. IKS 03.01 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek : kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Hal-hal penting dalam perhitungan indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10 %

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekwensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekwensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekwensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10 %

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan, khusus triwulan 1 batas pemutakhiran adalah 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20 %

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan

- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
4. Dispensi SPM – Bobot Penilaian 5 %
- ✓ Dispensi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM yang disampaikan ke KPPN dan telag diterbitkan SP2D nya pada triwulan IIV
 - ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

Berdasarkan berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2025 pada pada modul Monev Pelaksanaan Anggaran. diperoleh capaian indikator kinerja “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh semester I sebesar 98,65 dengan gambar sertifikat penghargaan dari KPPN sebagai berikut :

Gambar 13 Sertifikat Penghargaan Capaian IKPA Terbaik Dari KPPN Banda Aceh



Pada periode semester II atau capaian akhir tahun 2025, Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal KKP, Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II tahun 2025 (terlampir) diperoleh capaian indikator kinerja “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah sebesar 98,99 dengan beberapa tangkap layar (<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>) sebagai berikut :

Gambar 14 Capture Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

NO	KODE AKADEMI	KODE BA	KODE SATKER	LOKASI SATKER	REPERANGKAT	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOLAK	KODE BOKOR	DIPERIKSA (PM)	NILAI RENDAH (NILAI TOTAL KAWASIR BOKOR)	
						REVISI DATA	DEKOR HASILAN (R. SPM)	PERIKSAAN ANGGARAN	BEKAS KONTAKTUAL	PERIKSAAN TUGAS	REVISI DATA					CAKUPAN OUTPUT
1	001	002	04358	STASIUN KAWANTANAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KESEKUTAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100,00	94,80	100,00	0,00	0,00	98,99	100,00	75,16	001	0,00	98,99
					Nilai	10	15	20	5	5	10	25				
					Nilai Akumulasi	10,00	14,28	20,00	5,00	5,00	10,00	25,00				
					Nilai Rata-rata	97,33			98,99		100,00					

Tabel 10 Target dan Realisasi Realisasi Nilai IKPA Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	98,28	97,02	96,17	97,47	98,41	-	92	98,99	107,60	92	107,60	92	107,60

**Gambar 15 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan
Central Government Advisory Tahun 2025**



1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada akhir tahun 2025 indikator ini dilakukan perhitungan. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data capaian seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II 2025, SKIPM Aceh menempati urutan ke 16 (enam belas) dari sejumlah 174 satuan kerja.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada semester I tahun 2024 terdapat nilai capaian sebesar 98,65. Sedangkan pada tahun 2025 capaian indikator kinerja mengalami kenaikan menjadi sebesar 98,99. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA BPPMHKP pusat nilai ini lebih tinggi karena BPPMHKP 94,64 dan capaian nilai IKPA KKP sebesar 90,31.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 2 tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu pada tahun 2023 sebesar 97,47 dan tahun 2024 naik menjadi sebesar 98,41. Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja lebih besar menjadi 98,99 dari nilai target 92. Nilai target tersebut sama dengan target di dokumen Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian Indikator Kinerja telah dilakukan upaya seluruh tim di SKIPM Aceh untuk melakukan pemenuhan ketentuan yang menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal (perencanaan dan penganggaran) namun sampai dengan akhir tahun 2025 mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA,

penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

7. IKS 03.02 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Secara otomatis nilai capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dapat diperoleh melalui aplikasi monev Kemenkeu di halaman <https://monev.kemenkeu.go.id/> yang terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI. Sedangkan secara manual formula perhitungan indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tampilan dibawah ini :

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

$NEf\ Satker$: Nilai Efektivitas Satker
 $RVRO_i$: Realisasi Volume RO i
 $TVRO_i$: Target Volume RO i
 n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

$NKA\ UEI$: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 $CIKP$: Capaian Indikator Kinerja Program
 NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker
 W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 $WNEf_{satker}$: Bobot Nilai Efektivitas Satker

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal KKP, Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (terlampir) diperoleh capaian indikator kinerja NKPA Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah sebesar 100 dengan tangkap layar Satker BPPMHKP halaman 14 nomor urut 19 sebagai berikut :

No. Urut	Nama Satker	Satker	Efektivitas		Efisiensi	
			Program	Target	Realisasi	Target
1	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
40	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
46	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
47	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
48	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
49	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
50	Stasiun KIPM Aceh	Stasiun KIPM Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan perhitungan pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id/user>), berikut perolehan indikator kinerja NKPA SKIPM Aceh Tahun 2025, dengan nilai yang sama yaitu 100, sebagai berikut :

Gambar 16 Indikator kinerja NKPA SKIPM Aceh Tahun 2025

MONEV 2025

STASIUN KAWATANA IRIH, PENGEDALAN RUMAH DAN KEAMANAN IRIH, PERUMPAH ACEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Dashboard

Monitoring

Statistik

Informasi

STASIUN KAWATANA IRIH, PENGEDALAN RUMAH DAN KEAMANAN IRIH, PERUMPAH ACEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan: 1 - 1 entri

Carit

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	001.01.000000	STASIUN KAWATANA IRIH, PENGEDALAN RUMAH DAN KEAMANAN IRIH, PERUMPAH ACEH	100,00	98,90	98,90

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKUP. All rights reserved.

Ekstensi 2019

Aplikasi MONEV KEMENKUP 1.0.0 2023-04-12 10:23:00

monex-jemberau-gs.01/app/2025/SatuanKerjaSatker

MONEV

STASIUN KAWATANA IRIH, PENGEDALAN RUMAH DAN KEAMANAN IRIH, PERUMPAH ACEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan: 1 - 1 entri

Carit

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RK	Penggunaan BKK	Penggunaan BKK	Effisiensi BKK
1	001.01.000000	STASIUN KAWATANA IRIH, PENGEDALAN RUMAH DAN KEAMANAN IRIH, PERUMPAH ACEH	100,00	100,00	100,00	100,00	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKUP. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKUP 1.0.0 2023-04-12 10:23:00

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan penilaian. Nilai kinerja ini diperoleh dari aplikasi monev Kemenkeu yang telah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI. Secara sistematis perhitungan nilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah diperhitungkan berdasarkan aplikasi SMART atau Monev Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id/user>).

Tabel 11 Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	92,50	-	71,50	100	120	71,5	120	71,50	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang dilakukan secara otomatis perhitungan melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/> dengan nilai sebesar 92,50. Namun nilai ini tidak dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 memperoleh capaian nilai lebih besar menjadi 100.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 sama dengan dengan Renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Pada tahun 2025 analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal, namun terdapat sebagian yang mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai NKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Selain itu dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>.

9. IKS 03.03 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT..... Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT}} \times 100\%$$

Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT

Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor 82/SJ.2/ITJ/RC.610/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2025 (terlampir) diperoleh capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Nilai tersebut diperoleh dari data pada Unit Kerja BPPMHKP tidak ada nilai temuan keuangan dari nilai realisasi anggaran, sehingga persentase temuan sebesar 0 %, dengan tangkap layar lampiran nota dinas sebagai berikut :

**Tabel Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK
Atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

1. Capaian Indikator Kinerja

Sampai dengan akhir periode tahun 2025 tidak ada audit yang dilaksanakan secara langsung oleh BPK di Stasiun KIPM Aceh. Telah dilakukan upaya pemenuhan seluruh dokumen serta data dukung yang diperlukan sesuai arahan secara online. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja pada periode tahun 2025 ini.

Tabel 12 Target dan Realisasi IKS 03.03 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh/ Persen.	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2024 terdapat capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebesar 100 %. Pada periode tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 belum dapat dilakukan, karena dokumen Renstra masih dalam penyusunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait temuan BPK, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan pemantaun dan evaluasi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran indikator kinerja ini dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, namun sebagian mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK adalah dengan melakukan pemenuhan seluruh dokumen data dukung atau laporan keuangan sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

10. IKS 03.04 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM

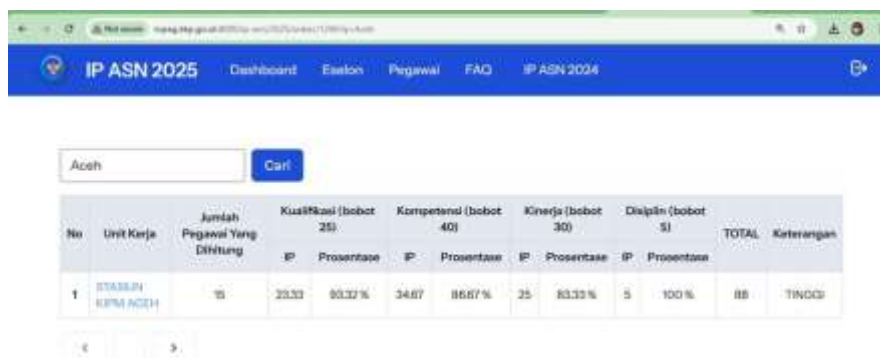
Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem yang telah ditentukan.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula perhitungan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Berikut tangkap layar nilai IP ASN dari data <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn> yang telah terintegrasi dengan data digital My ASN BKN pada halaman <https://asndigital.bkn.go.id/>.

Gambar 17 Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025



The screenshot displays the 'IP ASN 2025' dashboard. At the top, there are navigation tabs: 'Dashboard', 'Eselon', 'Pegawai', 'FAQ', and 'IP ASN 2024'. Below the tabs, a search bar shows 'Aceh' with a 'Cari' button. The main content area features a table with the following data:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	STASIUN KIPM ACEH	15	23.33	93.33 %	34.67	86.67 %	25	83.33 %	5	100 %	88	TINDOK

At the bottom of the table, there are navigation controls: '<', '>', and '3'.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilakukan perhitungan capaian. Capaian nilai IP ASN tahun 2025 sebesar 88 (kategori tinggi) dari target senilai 82 atau setara persentase capaian sebesar 107,32 %. Nilai tersebut diperoleh atas kerjasama seluruh pegawai SKIPM Aceh yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat terkait kompetensi yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja.

Tabel 13 Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Indeks	81,57	82,36	83,45	89,89	91,94	-	82	88	107,32	82	107,32	82	107,32

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data pada ropeg.kkp.go.id capaian dari indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mengalami penurunan dari periode tahun 2024 sebesar 91,94. Target periode tahun 2025 sebesar 82 dengan capaian sebesar 86,67.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra terbaru, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai nilai yang sama.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama yang terus mendapat perhatian dari seluruh pegawai. Selain itu Kepala SKIPM Aceh berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerjanya. Terdapat upaya partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan bimbingan teknis, seminar, pelatihan atau diklat dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh pusat BPPMHKP maupun instansi lain yang terkait. Penurunan nilai capaian, dimungkinkan karena terdapat

data pegawai PNS yang mengalami kendala dalam sinkronisasi data di ASN Digital yang tidak terbaca dalam satuan unit kerja SKIPM Aceh sampai dengan waktu penutupan data tahun 2025.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Seluruh pegawai memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis terkait secara *daring*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPPMHKP, Unit eselon lain, e-milea KKP maupun penyelenggara eksternal lainnya.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak secara khusus dialokasikan. Terdapat pagu anggaran dukungan manajemen internal namun sebagian mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup SKIPM Aceh serta melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Selanjutnya secara mandiri setiap pegawai PNS melakukan input data pada portal BKN dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator yang telah ditunjuk. Hal ini akan terus dilakukan pembaharuan atau peremajaan secara berkelanjutan.

11. IKS 03.05 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 14 Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	87,40	-	-	85,50	-	86	89,35	103,90	86	103,90	86	103,90

Pada tahun 2025 indikator kinerja nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilakukan perhitungan dalam bentuk indeks. Berdasarkan surat dari Sekretaris BPPMHKP Nomor 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP (terlampir) diperoleh capaian indikator kinerja “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah sebesar 89,35 atau setara dengan indeks (kategori “A”). Berikut beberapa tangkap layar hasil Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh tahun 2025 dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP melalui LKE pada aplikasi kinerjaku dengan perolehan nilai yang sama yaitu 89,35.

Gambar 18 Capaian Indikator Kinerja Penilaian SAKIP SKIPM Aceh Tahun 2025

The screenshot shows a web application for SAKIP evaluation. At the top, there's a header with 'Unit Kerja Lingkup' (Unit Work Scope) set to 'STASIUN KIPM ACEH' and 'Tahun' (Year) set to '2025'. Below this is a table with columns: NO, Kode, UNIT KERJA, PERENCANAAN KINERJA (30%), PENGUKURAN KINERJA (30%), PELAPORAN KINERJA (15%), EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (20%), NILAI AKUNTABILITAS, and PREDIKAT. The table shows one row for 'STASIUN KIPM ACEH' with values: 27.60, 27.60, 13.50, 21.25, 89.35, and A. At the bottom, it says 'Menyaring 1 dari 1 entri' and has 'Previous' and 'Next' buttons.

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (20%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	184300000	STASIUN KIPM ACEH	27.60	27.60	13.50	21.25	89.35	A

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	BKIPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
2	SEKRETARIAT BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
3	BKIPM MAKASSAR	27	27	13.5	22.5	90	A
4	SKIPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	89.55	A
5	SKIPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	89.35	A
6	SKIPM JAMBI	27	27	12.15	23	89.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.6	22.5	89.1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.8	A
10	BKIPM MEDAN I	27	27	12.15	22.5	88.65	A
11	SKIPM PALANGKARAYA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	BKIPM TARAKAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2025 ini telah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sekeretariat BPPMHKP bersama dengan Tim Penilai Internal lingkup KKP melalui LKE yang terdapat pada <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan data capaian SAKIP lingkup BPPMHKP sebesar 89,35, yang mana lebih besar dari capaian tahun 2024 sebesar 85,50. SKIPM Aceh menempati urutan ke 5 (lima) lingkup unit pelaksana teknis (UPT) lainnya di seluruh Indonesia.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator kinerja yang tidak setiap tahun masuk dalam dokumen kinerja. Penilaian mandiri SAKIP telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BKIPM pada tahun 2024. Terdapat unit kerja yang menjadi *sampel* uji petik penilaian SAKIP secara langsung yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal lingkup KKP. Pada tahun 2025 indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sama dengan dokumen Renstra.

Gambar 19 Sertifikat Pelatihan E-Milea SAKIP Tahun 2025



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.622/DA/PSDM.510/VI/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Diky Agung Setiawan

NIP : 19781032009021002

Tempat Lahir : Samudang

Tanggal Lahir : 30 Oktober 1978

Pangkat/ Gol. Ruang : /0a

Jabatan : Kepala

Instansi : BPPMBKP Aceh

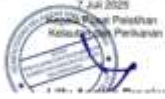
Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning melalui 12 (dua belas) jam pelajaran (JP).



7 Juni 2025





SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.622/DA/PSDM.510/VI/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Dani Kasmun, S.ST., M.Si.

NIP : 198007062019031001

Tempat Lahir : Air Lusi, Kabupaten Soko

Tanggal Lahir : 6 Juli 1980

Pangkat/ Gol. Ruang : IIIc

Jabatan : Kepala Urusan Umum

Instansi : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Aceh

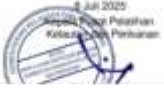
Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning melalui 12 (dua belas) jam pelajaran (JP).



8 Juni 2025





SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.622/DA/PSDM.510/VI/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Retno Sari Putri

NIP : 198803122011022002

Tempat Lahir : Padang

Tanggal Lahir : 12 Maret 1988

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda/ IIIa

Jabatan : Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Malar

Instansi : BPPMBKP Aceh

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning melalui 12 (dua belas) jam pelajaran (JP).



17 Juni 2025



4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam setiap unsur AKIP, pemenuhan dokumen, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Diperlukan peningkatan sumber daya pengelola kinerja baik melalui diklat atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun *online*.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait SAKIP, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal dan kegiatan terkait arsip.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran terkait dukungan manajemen yang mendukung indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sebagian mengalami revisi blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penilaian SAKIP SKIPM Aceh.

12. IKS 03. 06 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun s.d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP secara otomatis. Berikut komponen perhitungan unsur serta tampilan gambar aplikasi SIDAK KKP tahun 2025 sebagai berikut :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

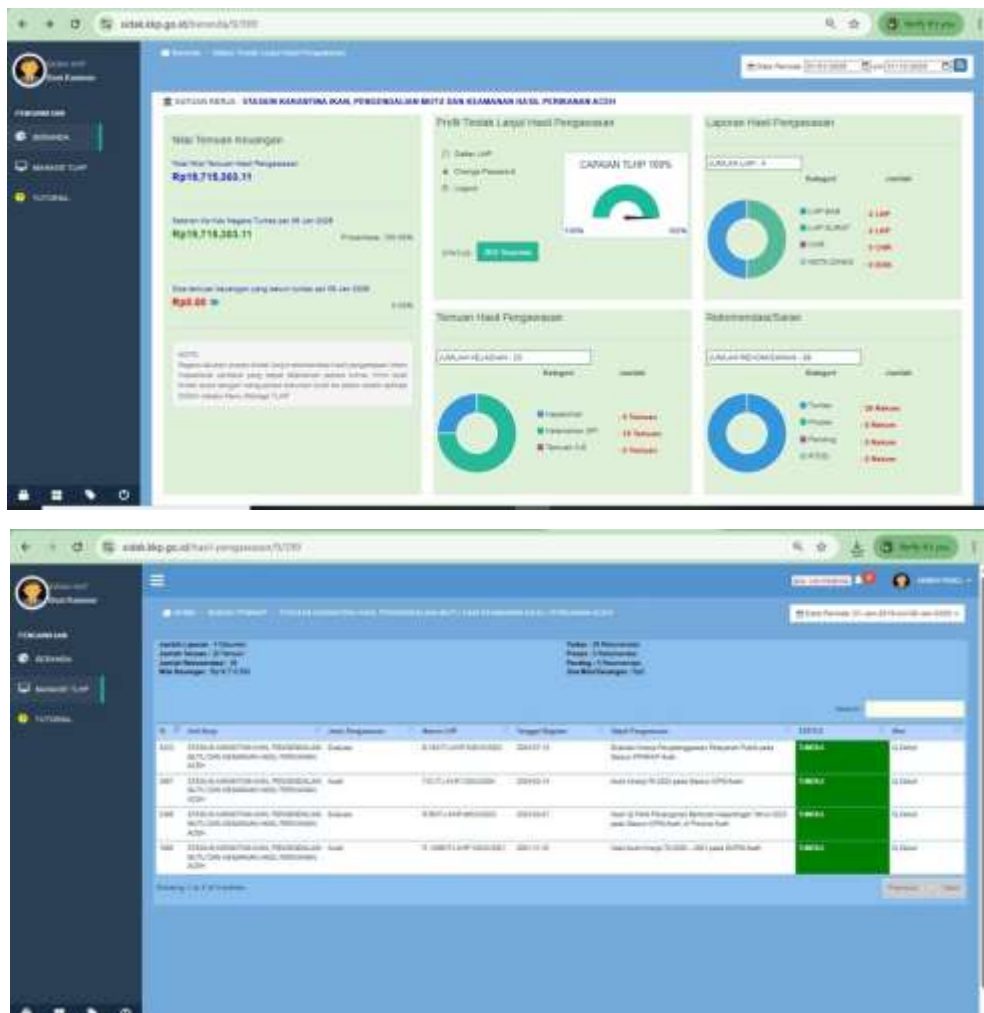
$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 diperoleh sebesar 100 %. Pada tahun 2024 SKIPM Aceh menjadi salah satu lokasi pengawasan audit oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Aceh telah berupaya menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja. Sampai dengan akhir tahun 2025, seluruh temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus “SUKSES” dengan capaian sebesar 100 % dari target sebesar 85 %, Data tersebut bisa dilihat dari tampilan pada *dash board* aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tampilan tangkap layar aplikasi SIDAK tahun 2025 ditampilkan sebagai berikut.

Gambar 20 Capture Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2025



Tabel 15 Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2024 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	100	100	100	100	-	85	100	117	85	117	85	117

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tahun 2025, SKIPM Aceh mencatat capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2025 yang diperoleh dari tangkapan layar portal SIDAK, nilai capaian pada triwulan III tetap berada pada angka 100%, yang menunjukkan kondisi bahwa SKIPM Aceh terus berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 sama jika dibandingkan dengan dokumen Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2025 tidak terdapat obyek pengawasan. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai diperlukan agar seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi namun mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan tindak lanjut pemenuhan dokumen atas rekomendasi Inpektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan.

13. IKS 03.07 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100 \%$$

1. Capaian Indikator Kinerja

SKIPM Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan PBJ adalah sebagai berikut :

- Hasil monitoring sementara realisasi penginputan data RUP Aceh telah sesuai dengan kebijakan pencatatan RUP 2025, Dimana pagu pengadaan barang/jasa sama nilainya dengan pagu RUP yang telah diumumkan.
- Pada Bulan Maret 2025 terdapat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang mewajibkan satuan kerja untuk melakukan revisi atas pagu RKAKL Tahun 2025. SKIPM Aceh telah melakukan upaya revisi sesuai Instruksi Presiden tersebut, dengan melakukan penyesuaian optimalisasi perencanaan PBJ data pada SIRUP.
- Melalui surat Sekretaris Jenderal (Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa) Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 TA 2025). Untuk capaian IKU Rencana Umum PBJ di lingkup BPPMHKP sudah mencapai 100 %.
- Mulai tanggal 24 Juni SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) berpindah halaman website di alamat <https://spse.inaproc.id/kkp/>
- Melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal (Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa) Nomor 41/SJ.7/PL.410/II/2026 tanggal 13 Januari 2026, perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian

- Berikut perhitungan dan tangkap layar nilai capaian SKIPM Aceh mengacu pada daftar tabel UPT BPPMHKP dengan nomor urut 20 sebagai berikut :

$$\% \text{ RUP PBI} = 100 \%$$

4. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Laporan Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai target sebesar 76 %. Indikator ini memiliki periode pelaporan secara triwulanan dan jenis perhitungan data akumulasi akhir. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 10 %; perencanaan dan persiapan sebesar 13,75 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 10,00 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 31,84 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan sebesar 15 %. Berikut data target dan realisasi indikator tersebut.

Tabel 16 Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	-	-	76	100	120	76	120	76	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP adalah sebesar 84,34 %. Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 dapat tercapai 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga pada tahun sebelumnya belum ada. Capaian dengan target pada Renstra adalah sama besarnya.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan operasional perkatoran, dimana sebagian pagunya mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai capaian indikator ini dengan melakukan koordinasi dengan tim Internal, PBJ Aceh, BPPMHKP Pusat dan LKPP.

14. IKS 03.08 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Unit Kerja yang menjadi *pilot project*, tapi juga dilakukan pada semua Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja eselon I, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM hendaknya dapat memotivasi Unit Kerja lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan yang efektif. Pembinaan harus dilakukan terhadap Unit Kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa, mendapatkan prioritas tambahan anggaran dalam APBNP atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja dilingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan menghitung prosentase nilai pembangunan integritas UPT diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal / BPPMHKP KKP.

Tujuan pemantauan dan penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM antara lain untuk :

- a. Mengetahui perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diseluruh UPT
- b. Sebagai tahapan proses berkelanjutan atas komitmen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan dokumen pemenuhan LKE pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan memastikan bahwa indikator Zona Integritas telah dilengkapi dengan bukti dukung yang memadai.

Ruang lingkup penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- A. Pengungkit (Pemenuhan dan Reform)
 1. Manajemen Perubahan
 2. Penataan Tata Laksana
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 4. Penguatan Akuntabilitas
 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- B. Hasil
 1. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
 2. Pelayanan Publik Yang Prima

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 indikator mengalami perubahan menjadi Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai target senilai 75. Pada periode tahun 2025 seluruh komponen di SKIPM Aceh tetap berusaha menjaga konsistensi dan melakukan pembaharuan pemenuhan seluruh data dukung komponen pengungkit dan hasil secara berkala sesuai ketentuan. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah sebesar 86,03 % seperti data berikut ini.

Gambar 22 Tangkap Layar Data Capaian Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM SKIPM Aceh Tahun 2025

##

**Nilai Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025
(Penilaian Mandiri Lingkup BPPMHKP)**

WBK

Unit Kerja SKIPM Aceh

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	Persentase	Pemenuhan Nilai Min
A.	PENGUNGKIT	60,00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,47	3,67	7,14	89,23%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	3,08	2,33	5,42	77,38%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	3,93	5,00	8,93	89,32%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,84	4,01	8,85	88,54%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	4,30	6,88	11,17	74,47%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,58	4,03	8,61	86,09%	OK
	TOTAL PENGUNGKIT				50,12	83,53%	OK
B.	HASIL	40,00					
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			19,85	88,22%	OK
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17,50			16,10	92,00%	OK
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75	75,00%	OK
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			16,06	91,75%	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			16,06	91,75%	OK
	TOTAL HASIL				35,91	89,77%	
	NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS				86,03		OK

Tabel 17 Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	-	-	70	86,03	120	70	120	70	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2024 pendekatan yang dipergunakan adalah Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 81,98 dari target 75 atau setara dengan 109,31 % dari target. Sedangkan pada tahun 2025 capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tercapai sebesar 86,03.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 adalah sebesar 75. Sampai dengan akhir tahun 2025 sama jika diperbandingkan dengan dokumen Renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK, peningkatan integritas, peningkatan layanan, peningkatan kinerja serta penciptaan inovasi. Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 terus dilakukan pembaharuan oleh seluruh tim.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya oleh seluruh pegawai yang terlibat dalam mendukung indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK, salah satunya dengan penggunaan teknologi dalam pemenuhan dokumen serta untuk mengikuti pelatihan pelatihan terkait.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung oleh anggaran yang terdapat di kelompok dukungan manajemen, namun sebagian anggaran mengalami perubahan karena blokir anggaran anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Pada periode selanjutnya, besar harapan melalui terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, khususnya setelah terbentuknya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Secara bertahap seluruh elemen dan SDM UPT khususnya di wilayah Aceh dibawah BPPMHKP mampu menciptakan inovasi baru dan memenuhi seluruh unsur penilaian pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dimana indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh memiliki beberapa unsur yang menjadi penilaian yaitu manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

15. IKS 03.09 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Berikut formula yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM unit pelayanan x 25

SKIPM Aceh Mempergunakan Data Nilai Capaian Perolehan Survei Kepuasan Masyarakat Yang Ada Di <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> dan melakukan konversi ke dalam indeks. Sekain itu berdasarkan surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B. 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025, SKIPM Aceh memperoleh nilai SKM yaitu sebesar 96,35. Berikut perhitungan capaian IKM SKM Aceh tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKM = \frac{96,35}{25} \qquad IKM = 3,85$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 ini, SKIPM Aceh melakukan kembali pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh triwulan IV sebanyak 16 (enam belas) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Aceh, diperoleh hasil skor survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 96,35 (indeks sebesar 3,85). Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan “Baik”. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa. Hasil pelaksanaan SKM telah dipublikasikan kepada publik melalui *social media*.

Gambar 23 Jenis Layanan BPPMHKP Aceh

CONTACT CENTRE
BPPMHKP
ACEH

JENIS LAYANAN

- ✓ Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal
- ✓ Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
- ✓ Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIK)
- ✓ Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
- ✓ Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP
- ✓ Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- ✓ Pengujian Laboratorium

JAM OPERASIONAL

SENIN - KAMIS
08:00 - 16:00 WIB

JUMAT
08:00 - 16:30 WIB

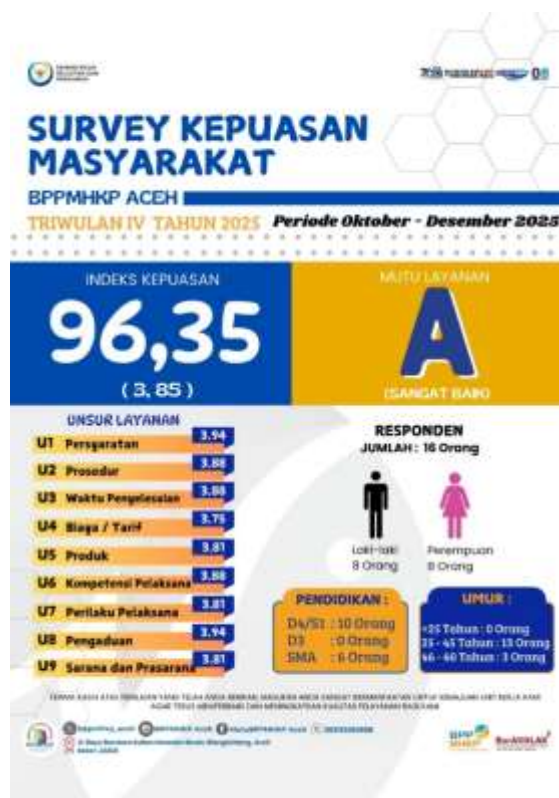
INFORMASI LAINNYA

082181360808

Jl. Raya Bandara Sultan Iskandar
Muda, Blangintang, Aceh Besar

BerAKHLAK

Gambar 24 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat SKIPM Aceh Tahun 2025



Tabel 18 Detail Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2025

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,94	3,88	3,88	3,75	3,81	3,88	3,81	3,94	3,81
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	96,35 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 19 Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	-	-	3,36	3,85	114,58	3,36	114,58	3,36	114,58

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan nilai SKM tahun 2024 terkait capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh sebesar 88,75. Jika dilakukan perbandingan capaian terdapat pada tahun ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 96,35, jika dikonversikan kedalam satuan indeks tercapai sebesar 3,85. Berikut tampilan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data pada dokumen Renstra capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai nilai yang sama.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan. Analisa lebih lanjut telah diupayakan untuk menghindari terjadinya kesalahan input data pada pengisian oleh responden. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat dibandingkan capaian periode sebelumnya. *Human error* dimungkinkan dapat terjadi sebagai keputusan atau perilaku responden yang tidak tepat yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa sistem yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi performa instansi. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Aceh untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya dengan Badan Karantina Indonesia di Aceh, karena sampai dengan saat ini secara sistem dan proses masih terkait dengan kegiatan pelayanan karantina ikan. Koordinasi harus terus ditingkatkan agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, karena dalam implementasinya indikator ini melibatkan dukungan dari seluruh kegiatan bidang teknis pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 didukung melalui seluruh kegiatan terkait pelayanan dan teknis kepada pengguna jasa, namun sebagian mengalami perubahan karena blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat internal petugas sosialisasi kepada pengguna jasa terkait sistem, produk dan spesifikasi jenis layanan; publikasi prosedur layanan dan prosedur persyaratan melalui media cetak (*banner*, brosur, dll) dan media elektronik / media sosial.

Selain capaian kegiatan yang menjadi indikator kinerja SKIPM Aceh Tahun 2025 yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa kegiatan yang dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi capaian serta mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berikut beberapa dokumentasi dan penghargaan yang telah diraih oleh SKIPM Aceh Tahun 2025, terkait capaian kinerja Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan capaian Penerapan ISO 9001:2015 yang menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk menjamin kualitas produk atau jasa secara konsisten .

Gambar 25 Piagam Penghargaan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Gambar 26 Sertifikat Penerapan ISO 9001:2015 SKIPM Aceh



3.2. Anggaran

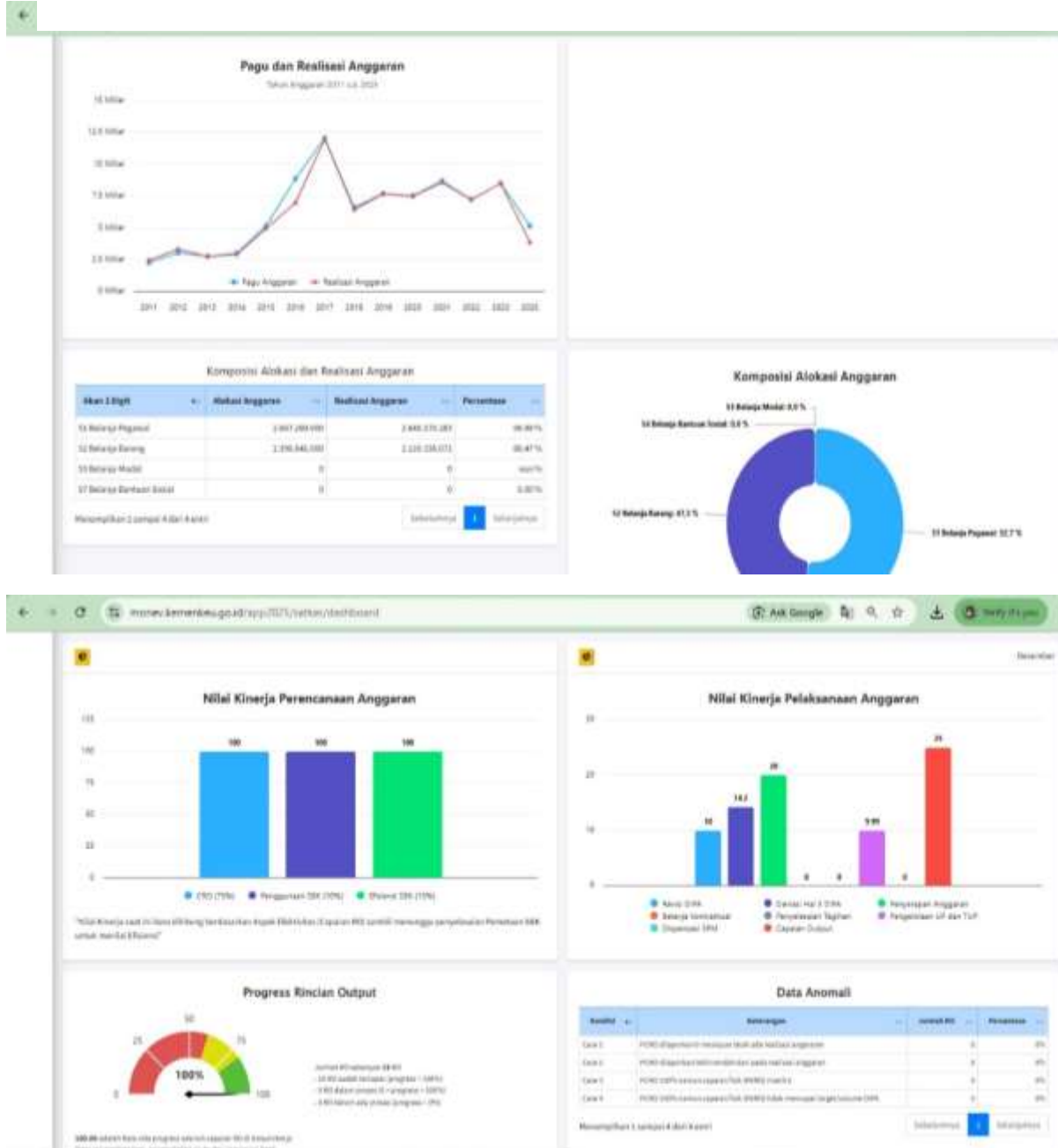
Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran SKIPM Aceh tahun 2025 berdasarkan data RKAKL dengan pagu awal adalah sebesar Rp. 5.063.910.000,- hingga pagu efektif terbaru berdasarkan revisi per Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.787.744.000 ,-. Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan SKIPM Aceh pada tahun 2025 hingga akhir bulan Desember terserap sebesar 99,44 %, dengan nilai Rp.4.760.696.355,-. Pencapaian atau realisasi ini tentunya adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di SKIPM Aceh.

Sampai dengan periode akhir tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran untuk efisiensi anggaran. Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, SKIPM Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu SKIPM Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.

Gambar 27 Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2025

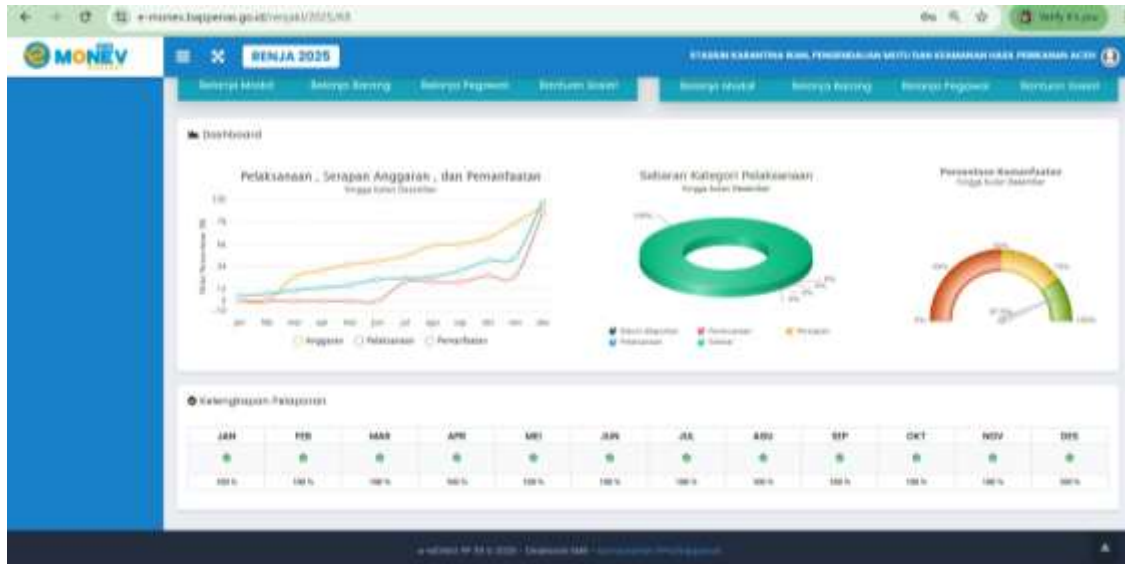


Gambar 28 Data Moneyv Keuangan SKIPM Aceh Tahun 2025



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/2025>

Gambar 29 Data Money BAPPENAS Tahun 2025



Sumber : <https://e-money.bappenas.go.id/portal/2025>

Tabel 20 Data Neraca Barang Milik Negara Tahun 2025

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 032
UAKPB : 649589

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH

Tgl.Data : 11/01/26 12:36 PM
Tgl.Cetak : 12/01/26 10:55 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_po

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	12,091,670
117131	Bahan Baku	117,993,576
131111	Tanah	985,295,000
132111	Peralatan dan Mesin	5,153,100,834
133111	Gedung dan Bangunan	5,517,949,152
134113	Jaringan	79,716,000
135121	Aset Tetap Lainnya	41,802,500
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,791,517,430)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(926,226,740)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(30,889,950)
J U M L A H		6,159,314,612

3.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Stasiun KIPM Aceh berdasarkan data sistem informasi kepegawaian hingga bulan Maret tahun 2025 sebanyak 16 orang PNS, 5 orang PPPK; 2 orang PPPK Paruh Waktu dan tenaga lainnya sebanyak. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja terbaru, dimana dengan terbentuknya BPPMHKP. Berikut data jumlah pegawai di SKIPM Aceh.

Tabel 21 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala SKIPM Aceh)	1 Orang
2	Ketua Tim Kerja	
	a. Dukungan Manajemen / Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1 Orang
	b. Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	c. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	d. Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
3	Fungsional Tertentu :	
	a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2 Orang
	b. Asisten Inspektur Mutu	3 Orang
	c. Pranata Komputer	1 Orang
4	Fungsional Umum	
	a. Analisis Mutu Hasil Perikanan	3 Orang
	b. Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian	1 Orang
	c. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1 Orang
5	PPPK	5 Orang
6	PPPK Paruh Waktu	2 Orang
7	Tenaga Lainnya	5 Orang
Total		28 Orang

Tabel 22 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister (S2)	5 Orang
2	Sarjana / Diploma IV (S1/DIV)	7 Orang
3	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4	SLTA / Sederajat	1 Orang

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja di SKIPM Aceh dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data pada aplikasi kinerja SKIPM Aceh. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Desember Tahun 2025 adalah sebesar 113,52 (kategori : istimewa), dengan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja tercapai melebihi target (persentase 120 %) dan 2 (dua) indikator kinerja melebihi target (persentase lebih 100 %). Telah dilakukan upaya dan strategi agar capaian atau realisasi indikator kinerja SKIPM Aceh dapat terus meningkat di masa yang akan datang dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja SKIPM Aceh yang disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2025 telah tercapai sesuai rencana. Tantangan yang dihadapi SKIPM Aceh ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan ; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan kedepan adalah adanya perubahan atau penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dimana BPPMHKP menjadi Otoritas Kompeten terhadap pemenuhan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi SKIPM Aceh ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; perlunya pemantapan regulasi dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKIPM Aceh dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut

- Meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder baik internal SKIPM Aceh, BPPMHKP, UPT KKP, maupun eksternal (pengguna jasa, penyuluh perikanan, Pemerintah Aceh, Bea Cukai, BKHIT, dan lain lain), guna memperoleh hasil maksimal dalam pengawasan dan pengendalian mutu primer.
- Melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan zona integritas dan pemenuhan dokumen di SKIPM Aceh agar lebih optimal.

Demikian laporan kinerja SKIPM Aceh tahun 2025 ini dibuat, semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pengelolaan dan pelaporan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Diky Agung Setiawan**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Aceh

Diky Agung Setiawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi)	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	82
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		15.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	3,36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.622.674.000,-
2.	Manajemen Mutu	124.500.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	40.570.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025		4.787.744.000,-

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Aceh

Diky Agung Setiawan